

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka

Tris Dina Susanti^{1*}, Dendit Naufal Zaidanirabani²

^{1,2}Administrasi Publik FISIP Universitas Majalengka

* trisdinasudirman1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the results of the evaluation of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Banjaran District, Majalengka Regency. The research method used is descriptive qualitative, namely a real description of the state of a program, and the types of data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The number of informants used was 18 people. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research conducted show that several indicators in the form of Effectiveness in the Non-Cash Food Assistance Program in Banjaran District, Majalengka Regency are quite effective because the service units provided are able to match the goals set. Efficient because in this case to get Non-Cash Food Aid is free of charge. Adequacy is still insufficient, this is because the nominal given is still unable to meet the food needs of the beneficiaries. Even distribution in the process of distributing aid as a whole is still uneven. Responsiveness has a good response from the Social Service and Beneficiary Families because it is able to create empowerment and reduce the economic burden on poor families.

Keywords: Poverty, Evaluation. Non-Cash Food Assistance Program, Qualitative.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu gambaran secara nyata terkait keadaan suatu program, dan tipe teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jumlah informan yang digunakan yaitu sebanyak 18 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator berupa Efektivitas dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka cukup efektif karena dalam unit pelayanan yang diberikan mampu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Efisien karena dalam hal ini untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai ini tidak dipungut biaya. Kecukupan masih kurang mencukupi, hal ini dikarenakan nominal yang diberikan masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangan penerima manfaat. Perataan dalam proses penyaluran bantuan secara keseluruhan masih belum merata. Responsivitas memiliki respon yang baik dari Dinas Sosial maupun Keluarga Penerima Manfaat karena mampu menciptakan pemberdayaan dan pengurangan beban ekonomi keluarga miskin.

Kata Kunci : Kemiskinan, Evaluasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai, Kualitatif.

Korespondensi: Tris Dina Susanti. Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Majalengka. Jl.K.H Abdul Halim Majalengka 45418. No. HP, WhatsApp: +62 821-1779-7800 Email: trisdinasudirman1@gmail.com

Submitted: Juli 2024 | Accepted: Agustus 2024 | Published: September 2024

E-ISSN3064-0679 | Website: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/japri/>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ini menjadi tantangan terbesar dalam setiap era kepemimpinan presiden, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk memastikan kesejahteraan seluruh warganya dan mengatasi kemiskinan. Akibat kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kelompok miskin, termasuk tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, hak atas pendidikan dan kesehatan, serta akses ke pekerjaan yang layak dan perlindungan hukum. Penanganan kemiskinan yang kompleks memerlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak (Dye, 2017; Edward & Sharkansky, 1978).

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah meluncurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 (Kuswati, 2021; 2022). Program ini menggantikan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) sejak Januari 2017. BPNT bertujuan mengurangi beban pengeluaran pangan dan memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini menerapkan prinsip 6T: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi (Mazmanian & Sabatier, 1983).

BPNT memberikan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan melalui uang elektronik, yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di E-warong, yang bekerja sama dengan bank penyalur. Bantuan yang tidak digunakan pada periode penyaluran akan hangus. BPNT merupakan program nasional yang dijalankan di seluruh Indonesia, termasuk di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Kecamatan ini memiliki luas 41,98 km², sekitar 3,43% dari luas Kabupaten Majalengka, yang memiliki populasi 1.318.965 dengan tingkat kemiskinan rata-rata 12,33% (Mulyadi, 2016).

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka meningkat dari 10,06% pada 2019 menjadi 12,33% pada 2021, meskipun mengalami penurunan menjadi 11,94% pada 2022 (Asrin, 2022). Data penerima BPNT di Kecamatan Banjaran juga meningkat dari 2.035 KPM pada 2019 menjadi 4.040 KPM pada 2022. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian (Aspar, 2020).

Namun, pelaksanaan BPNT di Kecamatan Banjaran menghadapi masalah seperti ketidaktepatan sasaran, di mana keluarga mampu justru menerima bantuan, serta saldo nol pada beberapa KPM akibat ketidaksesuaian data kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Dwita Agustina, 2022; Firdausi, 2022). Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan perbaikan dalam program ini (Harbani, 2013; Jefkins, 2004; Sugiyono, 2013; Yulianto Kadji, 2015; Zuchri Abdussamad, 2021).

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana keberhasilan dalam suatu program yang telah dijalankan maka perlu diadakanya evaluasi. Tujuannya untuk melihat kesalahan sedini mungkin yang terjadi dilapangan, sehingga dapat ditindak lanjuti agar adanya perbaikan. Untuk mengkaji lebih lanjut tentang berjalan nya suatu program dan penyebab masalah terkait yang dijelaskan di atas, maka penulis akan membahas tentang “Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan berfungsi untuk mengeksplorasi makna serta konteks dari data yang diperoleh. Metode ini tidak menekankan pada generalisasi, melainkan pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, yang relevan untuk lokasi dengan karakteristik serupa (Dye, 2017). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendetail tentang implementasi dan masalah yang dihadapi dalam program BPNT.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis perilaku dan situasi terkait BPNT, sebagaimana dijelaskan oleh Nana Sudjana dan Sutrisno Hadi (Sudjana, 2013; Hadi, 2013). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari responden melalui tanya jawab lisan, dengan mengacu pada definisi Hopkins yang menekankan pentingnya interaksi langsung dalam pengumpulan data (Hopkins, 2004). Dokumentasi mencakup catatan sejarah dan peraturan terkait, yang melengkapi data dari observasi dan wawancara (Kuswati, 2021). Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi kesimpulan, yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang program yang dievaluasi (Mulyadi, 2016).

Fokus penelitian adalah evaluasi Program BPNT dengan menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Dunn (Dunn, 2003). Informan penelitian dipilih melalui purposive sampling, melibatkan kunci informan seperti kepala bidang pemberdayaan sosial, supervisor pengolah data, tenaga kesejahteraan sosial, serta keluarga penerima manfaat dan pengelola e-warong (Harbani, 2013). Penelitian dilakukan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, selama enam bulan dari November 2022 hingga April 2023 untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai pelaksanaan BPNT dan tantangan yang dihadapinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas BPNT diukur berdasarkan sejauh mana program ini mencapai tujuannya, yaitu mengurangi beban pengeluaran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menyediakan bahan pangan bergizi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun banyak penerima merasa terbantu, sebagian besar menganggap bantuan tersebut belum cukup signifikan untuk mengurangi pengeluaran sehari-hari. Sebagai contoh, seorang penerima menyatakan bahwa meskipun mereka tidak perlu membeli beras, pengeluaran untuk kebutuhan lain tetap tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penerima manfaat, banyak yang merasa bahwa bantuan pangan yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan harian mereka. Satu keluarga melaporkan bahwa mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan makan selama satu minggu dengan bantuan tersebut. Namun, ada juga yang merasa bersyukur karena bantuan ini meringankan beban ekonomi mereka, terutama dalam menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak.

Dari segi efisiensi, proses pengajuan dan penyaluran BPNT dinilai cukup baik. Penerima manfaat tidak dikenakan biaya dalam proses pendaftaran dan pencairan bantuan. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka menginstruksikan pemerintah desa untuk memilih penerima berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan verifikasi data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-

NG), yang membantu memastikan bahwa hanya masyarakat yang layak yang menerima bantuan. Namun, meskipun prosesnya efisien, masih terdapat tantangan dalam hal pemutakhiran data penerima manfaat. Beberapa penerima melaporkan bahwa mereka terdaftar sebagai penerima meskipun kondisi ekonomi mereka sudah membaik.

Kecukupan bantuan menjadi isu penting dalam evaluasi ini. Banyak penerima manfaat mengeluhkan bahwa nominal Rp.200.000 per bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama sebulan. Beberapa responden menyebutkan bahwa mereka sering kali harus membeli tambahan makanan setelah dua minggu. Satu keluarga menyatakan bahwa mereka harus mengeluarkan sekitar Rp.30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, yang jika dihitung dalam sebulan mencapai Rp.900.000. Dengan demikian, jelas bahwa bantuan yang diberikan tidak mencukupi bagi banyak keluarga.

Dalam hal perataan layanan, masih terdapat ketidakmerataan dalam distribusi bantuan. Beberapa keluarga yang sudah sejahtera masih terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara keluarga yang membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan. Dinas Sosial berupaya melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Terdapat pengaduan dari masyarakat tentang ketepatan sasaran penerima bantuan, di mana beberapa individu yang seharusnya menerima bantuan justru belum terdaftar. Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pendataan dan verifikasi.

Responsivitas dari pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan BPNT. Wawancara dengan pihak Dinas Sosial menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya program ini dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Penerima manfaat umumnya merasa puas dengan jenis bantuan yang diberikan saat ini dibandingkan dengan program sebelumnya yang hanya menyediakan beras. Mereka merasakan dampak positif dari adanya variasi bahan pangan yang lebih lengkap dan bergizi.

Ketepatan program BPNT diukur dari kesesuaian antara data penerima manfaat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut laporan, sekitar 75% data penerima manfaat sudah sesuai dengan DTKS. Namun, masih ada 25% kasus di mana penerima mengalami kendala karena ketidakcocokan data kependudukan. Dinas Sosial terus berupaya memperbaiki data dan memastikan bahwa semua penerima mendapatkan

haknya tanpa mengalami masalah administrasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas program.

Secara keseluruhan, Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Banjaran menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa aspek namun masih memiliki tantangan signifikan terutama terkait kecukupan dan ketepatan sasaran. Meskipun banyak penerima merasa terbantu oleh program ini, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah bantuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pangan keluarga serta memperbaiki sistem pendataan agar lebih akurat dan responsif terhadap kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Banjaran, beberapa pandangan dan opini peneliti dapat disampaikan untuk memberikan perspektif lebih dalam mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh program ini.

Pertama, meskipun BPNT memberikan bantuan yang dianggap membantu mengurangi beban pengeluaran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), realitas di lapangan menunjukkan bahwa bantuan tersebut masih jauh dari mencukupi. Banyak penerima yang mengeluhkan bahwa nominal Rp.200.000 per bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama sebulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki niat baik, perlu ada peninjauan kembali terhadap besaran bantuan yang diberikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan angka yang lebih tepat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Kedua, dalam hal efisiensi, proses pengajuan dan penyaluran BPNT tampak berjalan dengan baik. Namun, tantangan dalam pemutakhiran data penerima manfaat menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem administrasi. Beberapa penerima yang terdaftar masih mengalami peningkatan kondisi ekonomi tetapi tetap menerima bantuan. Ini menandakan perlunya sistem verifikasi yang lebih ketat dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Peneliti berpendapat bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi data penerima.

Ketiga, terkait kecukupan bantuan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketahanan pangan keluarga. Selain jumlah nominal bantuan,

aspek kualitas bahan pangan yang diterima juga sangat penting. Banyak penerima melaporkan bahwa meskipun mereka menerima berbagai jenis bahan pangan, kualitasnya kadang tidak memadai. Oleh karena itu, perlu ada standar kualitas yang jelas bagi e-waroeng dalam penyediaan bahan pangan agar semua KPM mendapatkan gizi seimbang dan berkualitas.

Keempat, pengaduan mengenai ketidakmerataan distribusi bantuan menyoroti perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah. Beberapa keluarga yang sudah sejahtera masih terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Peneliti menyarankan agar Dinas Sosial melakukan audit berkala terhadap data penerima manfaat dan memperbaiki mekanisme pengusulan agar lebih transparan dan akuntabel.

Terakhir, responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat merupakan kunci keberhasilan BPNT. Meskipun banyak penerima merasa terbantu dengan adanya program ini, masih terdapat harapan akan peningkatan jumlah bantuan serta perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi. Pemerintah harus terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan mereka. Dengan demikian, BPNT dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun BPNT telah memberikan kontribusi positif bagi banyak keluarga di Kecamatan Banjaran, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan program ini benar-benar efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Peneliti berharap bahwa dengan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, BPNT dapat lebih optimal dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

SIMPULAN

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, telah menunjukkan hasil yang beragam dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, program ini telah berhasil memberikan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meringankan beban pengeluaran mereka. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hasil wawancara dengan penerima manfaat menunjukkan bahwa meskipun

mereka merasa terbantu, bantuan yang diberikan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama sebulan penuh.

Dari segi efektivitas, program BPNT telah memenuhi sebagian besar tujuannya, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan menyediakan bahan pangan bergizi. Namun, banyak penerima masih merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak cukup signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap besaran bantuan yang diberikan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Penelitian lebih lanjut dapat membantu menentukan angka yang lebih tepat untuk meningkatkan kecukupan bantuan.

Dalam hal efisiensi, proses pengajuan dan penyaluran BPNT dinilai cukup baik, tetapi tantangan dalam pemutakhiran data penerima manfaat masih menjadi masalah. Beberapa penerima terdaftar meskipun kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Oleh karena itu, sistem verifikasi yang lebih ketat dan berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Pelibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi data penerima.

Kecukupan bantuan menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Banyak penerima melaporkan bahwa nominal Rp.200.000 per bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama sebulan. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian terhadap jumlah bantuan yang diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara lebih efektif. Selain itu, kualitas bahan pangan yang diterima juga harus dijaga agar sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Banjaran telah memberikan kontribusi positif bagi banyak keluarga, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan program ini benar-benar efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Peneliti berharap bahwa dengan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, BPNT dapat lebih optimal dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2017). *Understanding public policy* (15th Ed.). New Jersey: Pearson Education Inc
- Edward, III G, C., & Sharkansky, I. (1978). *The Policy Predicament*. San Fransisco: W.H. Freemanand Company.
- Harbani, Pasolong. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Jefkins, F. (2004). *10 Public Relations*. Jakarta: PT. Gelors Aksara Pertama Erlangga.
- Kuswati, Y. (2021). *Kebijakan Publik (Public Policy)*. Majalengka: Universitas Majalengka.
- Kuswati, Y. (2022). *Kebijakan Publik*. Majalengka: Universitas Majalengka.
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Mulyadi, Dedy. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianto Kadji, M. (2015). *Formulasi dan Implementas Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Zuchri Abdussamad, S. M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV.Syakir Media Press.

Jurnal

Aspar, S. M. (2020). Jurnal Washiyah. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, 305-325.

Asrin, F. Y. (2022). Journal of Government Science Studies. *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau*, 86-94.

Dwita Agustina, S. M. (2022). Jurnal Universitas Negeri Surabaya. *Evaluasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto*, 179-190.

Firdausi, D. S. (2022). Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*, 1126-1132.

Kawung, A. M. (2020). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakaret Barat Dan Mahakaret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado*, 225-235.

Website

BPS, A. (2021, Desember 21). *Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Majalengka 2017- 2021*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka: <https://majalengkakab.bps.go.id/indicator/23/178/1/tingkat-kemiskinan-di- kabupaten-majalengka.html>

Data Base Peraturan BPK RI. (2019). Retrieved from Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos- no-20-tahun-2019>

JDIH BPK RI, A. (2019, NOVEMBER 21). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019*. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-20-tahun- 2019>

Pinhom Blog, A. (2022, September 29). *2 Contoh Penulisan Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis*. Retrieved from Pinhom Blog: <https://www.pinhome.id/blog/manfaat-teoritis-dan-praktis/>

Regulasip, A. (2017, Januari 8). *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017*. Retrieved from Regulasip: <https://www.regulasip.id/book/1609/read>